

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa SMP di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Henny Isnaini Hartini^{1*}, Jimmi Copriady², Suarman³
^{1,2,3} Universitas Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 06-01-2022

Disetujui: 23-11-2022

Diterbitkan: 24-11-2022

Kata kunci:

Implementasi kebijakan
Program Indonesia Pintar
PIP

ABSTRAK

Abstract: This research is entitled about the Implementation of the Smart Indonesia Card for Junior High School Students in Pekaitan District. The research was conducted because of the encouragement from the public to know about the Smart Indonesia Card in Pekaitan District. It is hoped that this research can have a positive impact on all groups, namely a more transparent policy. In connection with this background, the focus of the problem studied in this study is the implementation of the Smart Indonesia Card for junior high school students in Pekaitan District, Rokan Hilir Regency, The approach used in this study was descriptive qualitative. The results of the research are the Smart Indonesia Program in Pekaitan sub-district which has been implemented since 2015 until now. The procedure for implementing the Smart Indonesia Card Program consists of 6 stages, namely: (a) the proposal stage, (b) determination of recipients (c) socialization to parents, (d) distribution of funds/disbursement of funds (e) withdrawal of funds in cash by students (f) monitoring the implementation of PIP. For the following uses: Purchase books and stationery; Purchase school/practice uniforms and school supplies (shoes, bags, etc.); Finance the transportation of students to school; Student pocket money; The instructions for implementing KIP do not specifically mention the steps taken by schools in monitoring or supervising the use of KIP funds, so schools find it difficult to monitor the suitability of using KIP funds. Schools are also not required to make accountability reports related to the use of KIP funds because KIP scholarships are not managed by the school, the school is only a facilitator and forum in the PIP program. From an evaluation it can be seen a success of a program. The Evaluation System for the Implementation of the Smart Indonesia Program Policy for junior high school students in Pekaitan District is considered to have been effective based on the policy itself, its implementation and benefits are right on target.

Abstrak: Penelitian ini berjudul tentang Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMP di Kecamatan Pekaitan. Penelitian dilakukan karena adanya dorongan dari masyarakat untuk mengetahui tentang kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Pekaitan di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi semua kalangan yaitu sebuah kebijakan yang lebih transparan. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu Program Indonesia pintar di kecamatan Pekaitan mulai di implementasikan sejak 2015 hingga sekarang. Prosedur pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar terdiri dari 6 tahapan yaitu: (a) tahap pengusulan, (b) penetapan penerima (c) sosialisasi kepada orang tua, (d) penyaluran dana/pencairan dana (e) pengambilan dana secara tunai oleh peserta didik (f) monitoring pelaksanaan PIP. Untuk pemanfaatan sebagai berikut Membeli buku dan alat tulis; Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah; Uang saku peserta didik; Dalam petunjuk pelaksanaan KIP tidak disebutkan secara spesifik langkah yang dilakukan sekolah dalam memantau atau mengawasi penggunaan dana KIP, sehingga sekolah merasa kesulitan dalam mengawasi kesesuaian penggunaan dana KIP. Sekolah juga tidak dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana KIP karna beasiswa KIP tidak dikelola oleh sekolah, sekolah hanya sebagai fasilitator dan wadah dalam program PIP. Dari suatu evaluasi maka dapat diketahui suatu keberhasilan dari sebuah program. Sistem Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar bagi siswa SMP di Kecamatan Pekaitan di nilai sudah efektif berdasarkan Kebijakan itu sendiri, Pelaksanaan dan Manfaatnya tepat sasaran.

Alamat Korespondensi:

Henny Isnaini Hartini

Mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan PPs Univesitas Riau, Indonesia

E-mail: henny.ih@gmail.com

LATAR BELAKANG

Melalui pendidikan yang mencukupi diharapkan seseorang dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Pemerintah telah menyediakan kebijakan dalam dunia Pendidikan sebagai pemotong mata rantai kemiskinan berupa sebuah program yang disebut Program Indonesia Pintar. Program ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga diharapkan tidak ada lagi pikiran siswa putus sekolah. Program ini juga bertujuan menarik kembali siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran (Juknis PIP 2015).

Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit. Mereka tidak mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi. Kebijakan pemerintah mengadakan program ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dan membantu anak supaya tidak putus sekolah. Program ini seharusnya berjalan lancar dibanding program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan program-program lainnya dalam mengatasi kemiskinan di Negara Indonesia yang telah dilakukan beberapa tahun lalu. Program dengan latar belakang sama beranjak dari pengalaman dari program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Untuk memastikan Keberhasilan program kartu Indonesia pintar dapat dilihat dari implementasi program KIP di lapangan.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti merasa tertarik untuk menelaah fenomena dilapangan melalui metode observasi, wawancara, dan melakukan studi dokumentasi pada sekolah Menengah Pertama ada di Kecamatan Pekaitan Rokan Hilir yang menerapkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar dan peneliti ingin menelusuri secara mendalam. Disamping itu bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini dalam penggunaan penyaluran dana apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya apakah masih ada kendala yang belum terungkap pada pelaksanaannya. Maka berdasarkan hal tersebut dipandang perlu bagi penulis untuk mendeskripsikannya yakni melakukan penelitian tentang "*Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa SMP di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir*".

Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan: 1) Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar oleh siswa SMP di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. 2) Pemanfaatan program Kartu Indonesia Pintar oleh siswa SMP di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. 3) Pengendalian Program Kartu Indonesia pintar siswa SMP di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. 4) Sistem evaluasi program Kartu Indonesia Pintar siswa SMP di Kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir yaitu terdiri dari 3 sekolah Negeri dan 2 sekolah swasta diantaranya yaitu: SMP Negeri 1 Pekaitan, SMP Negeri 2 Pekaitan, SMP Negeri 3 Pekaitan, SMP S LKMD Teluk Bano II dan SMP S Pembina Rokan Baru. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan mulai dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer diperoleh dari *key informan* yaitu; kepala sekolah, dan siswa dalam lingkup seluruh situasi dan kondisi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di

Kecamatan Pekaitan. Selanjutnya teknik pengumpulan dan analisa data yaitu; observasi dan wawancara, dokumentasi, kemudian dilakukan Triangulasi data. Sedangkan sumber data sekunder seperti buku-buku, tulisan, arsip/dokumen, foto, data statistik yang bisa dikumpulkan dengan observasi dan di foto kopi atau di salin ulang.

Analisis data dalam penelitian ini mengarah pada analisis deskriptif atau analisis yang menggambarkan informasi faktual. Untuk itu teknik analisa data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan tidak menguji hipotesis maupun hubungan antar variabel. Analisis deskriptif kualitatif ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun pada bab terdahulu. Tingkat kedalaman analisis deskriptif pada penelitian ini hanya sampai pada penyajian fakta dan pendeskripsian data secara sistematis sehubungan dengan informasi dan fenomena implementasi kebijakan pendidikan program kartu indonesia pintar siswa SMP di Kecamatan Pekaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartu Indonesia Pintar (KIP) ialah program beasiswa dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya kurang atau tidak mampu membiayai pendidikan. Untuk tahun 2015 program tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015. Dalam penelitian tentang implementasi Kebijakan KIP bagi siswa SMP di Kecamatan Pekaitan di pandang dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan KIP yaitu suatu kegiatan yang meliputi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian serta sistem evaluasinya.

Tabel 1. Jumlah penerima KIP Siswa SMP di Kecamatan Pekaitan

No	Sekolah	Jumlah Penerima KIP di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SMP Negeri 1 Pekaitan	-	-	-	46	26	81	57
2	SMP Negeri 2 Pekaitan	3	19	27	4	15	48	-
3	SMP Negeri 3 Pekaitan	-	-	-	64	98	101	-
4	SMP S LKMD Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan	-	20	53	53	30	58	36
5	SMP S Pembina Rokanbaru Kecamatan Pekaitan	-	-	-	18	21	24	9

Adapun Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMP di kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir yaitu sudah berjalan sejak tahun 2015 dan sudah efektif. Adapun prosedur pelaksanaan PIP di SMP kecamatan Pekaitan yaitu: (a) tahap pengusulan, (b) penetapan penerima (c) sosialisasi kepada orang tua, (d) penyaluran dana/pencairan dana (e) pengambilan dana secara tunai oleh peserta didik (f) monitoring pelaksanaan PIP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dana PIP sangat memberikan manfaat pihak sekolah secara khusus bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya dana PIP, peserta didik dapat membeli sepatu, tas, buku, dan melunasi tunggakan yang ada di sekolah. Dana yang diterima setiap tahun sebesar 750.000,00, namun tidak semua peserta didik menerima sejumlah 750 ada yang memperoleh secara berahap yaitu selama persemester sebesar 375000,00,. Namun dana tersebut dianggap masih kurang karena kebutuhan peserta didik sangat banyak dalam satu tahun.

Pengawasan perlu dilakukan untuk memantau arah penggunaan dana sudah tepat sasaran atau belum. Dana KIP digunakan untuk kegiatan pendidikan dan tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Pada dasarnya sekolah mengalami kesulitan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana KIP. Hal tersebut dikarenakan dana KIP disalurkan langsung ke rekening pribadi peserta didik dan sekolah tidak mempunyai kewenangan melarang penggunaan dana KIP, sekolah hanyalah mengarahkan penggunaan dana PIP. bahwa peran sekolah dalam rangka

pelaksanaan KIP adalah mengusulkan peserta didik, mensosialisasikan PIP, menginformasikan bahwa dana sudah dapat cair dan membuat surat keterangan kepala sekolah. Strategi yang dilakukan sekolah dalam mengimplementasikan KIP adalah mempermudah pengumpulan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengusulan dan secepatnya menginformasikan nomor rekening kepada peserta didik. Sekolah berusaha mengusulkan peserta didik yang memang layak untuk diusulkan. Dari suatu evaluasi maka dapat diketahui suatu keberhasilan dari sebuah program. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar bagi siswa SMP di Kecamatan Pekaitan di nilai sudah efektif berdasarkan Kebijakan itu sendiri, Pelaksanaan dan Manfaatnya.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar pada SMP kecamatan Pekaitan, Peneliti menganalisis tentang perumusan tujuan, proses, pengelola dan sarana prasarana pelaksanaan PIP di SMP di Kecamatan Pekaitan. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen yang dilakukan, tujuan pelaksanaan PIP adalah untuk membantu peserta didik memenuhi kebutuhan pendidikannya, sehingga tidak ada peserta didik yang putus sekolah karena kesulitan ekonomi. Proses pelaksanaan PIP dirumuskan dengan mengacu pada Juknis PIP. Pengelola yang diperlukan dalam pelaksanaan PIP adalah yang memiliki kompetensi dan sudah mengetahui tentang PIP. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan PIP adalah adanya komputer atau laptop yang terhubung akses internet selanjutnya foto copy KIP, KK, KTP Orangtua dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun penelitian ini berjudul tentang Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMP di Kecamatan Pekaitan. Kecamatan Pekaitan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Di Kecamatan Pekaitan Terdapat 5 Sekolah Menengah Pertama terdiri dari 3 Sekolah Negeri dan 2 Sekolah Swasta, diantaranya yaitu SMP Negeri 1 Pekaitan terletak di Desa Pedamaran, SMP Negeri 2 Pekaitan terletak di Desa Karya Mulyo Sari, SMP Negeri 3 Pekaitan Terletak di Desa Sungai Besar, SMP S LKMD terletak di Desa Teluk Bano II dan SMP S Pembina Rokan Baru terletak di Desa Rokan Baru. Program Indonesia pintar di kecamatan Pekaitan mulai di implementasikan sejak 2015 hingga sekarang. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Prosedur pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar terdiri dari 6 tahapan yaitu: (a) tahap pengusulan, (b) penetapan penerima (c) sosialisasi kepada orang tua, (d) penyaluran dana/pencairan dana (e) pengambilan dana secara tunai oleh peserta didik (f) monitoring pelaksanaan PIP. Untuk pemanfaatan sebagai berikut Membeli buku dan alat tulis; Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah; Uang saku peserta didik.

Dalam petunjuk pelaksanaan KIP tidak disebutkan secara spesifik langkah yang dilakukan sekolah dalam memantau atau mengawasi penggunaan dana KIP, sehingga sekolah merasa kesulitan dalam mengawasi kesesuaian penggunaan dana KIP. Sekolah juga tidak dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana KIP karna beasiswa KIP tidak dikelola untuk sekolah. Dari suatu evaluasi maka dapat diketahui suatu keberhasilan dari sebuah program. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar bagi siswa SMP di Kecamatan Pekaitan di nilai sudah efektif berdasarkan Kebijakan itu sendiri, Pelaksanaan dan Manfaatnya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saran yang diberikan terkait implementasi Kebijakan KIP adalah sebagai berikut: *Pemerintah*: 1) Jalur pengusulan PIP cukup melalui satuan pendidikan baik formal/non formal, bila melalui kelompok kepentingan hendaknya ada kriteria khusus yang diterapkan misal melalui rekomendasi dinas sosial setempat; 2) Beasiswa PIP hendaknya dikelola oleh sekolah agar transparansi dana jelas dan tidak menimbulkan multipersepsi di masyarakat; 3) Validasi data penerima KIP/PIP didasarkan data dari sistem dapodik; dan 4) Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan

antara pengelola PIP baik di tingkat pusat, provinsi, sekolah dan lembaga penyalur. *Sekolah*: 1) Publikasi tentang informasi PIP lebih dioptimalkan; 2) Pengawasan PIP secara internal perlu dilakukan untuk memantau distribusi penggunaan dana; 3) Sekolah proaktif dengan pengaduan yang dilakukan oleh peserta didik; dan 4) Sekolah hendaknya melakukan kerja sama dengan lembaga di kelurahan terkait KIP dalam rangka validasi. *Siswa*: 1) Penggunaan dana KIP harus sesuai dengan arahan dari pihak sekolah dan juknis dalam penggunaan PIP; dan 2) Mengumpulkan nota pembelian kepada pihak sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hasbullah, H.M. (2014). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imron, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Jakarta: Sinar grafika.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Glialia Indonesia.
- Patilima. (2005). *Teknik Analisis Data*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
- Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Saroni, M. (2013). *Pendidikan Untuk Orang Miskin; Membuka Keran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, I., Tabrani. (2001). *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep Strategis dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT. Rinela Cipta.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.